

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP TAFSIR HUKUM
MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG POSISI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017**

SKRIPSI

Oleh:

Syifa' Muhammad

NIM. C95215106



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syifa' Muhammad
NIM : C95215106
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum
Mahkamah Konstitusi tentang Posisi Komisi
Peberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2019

Saya yang Menyatakan,



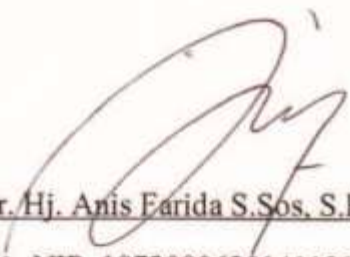
Syifa' Muhammad

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syifa' Muhammad NIM. C95215106 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 April 2019

Pembimbing




Dr. Hj. Anis Farida S. Sos, S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Sylfa' Muhammad NIM. C95215106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 14 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Dr. Hj. Anis Farida S.Sos, S.H, M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji II,


Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,


Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,

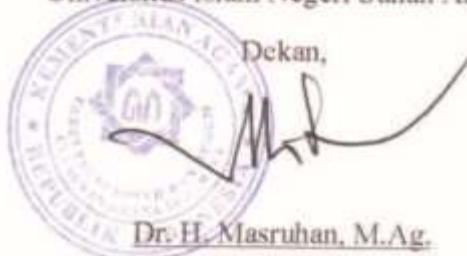

M. Faizur Rohman, MHI
NIP. 201603310

Surabaya, 17 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dekan,
Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syifa Muhammad
NIM : C95215106
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : aizawa720@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP TAFSIR HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG POSISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Juli 2019

Penulis


Syifa Muhammad

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah hasil penelitian yang difokuskan pada permasalahan mengenai tafsir hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menentukan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam putusannya yang bernomor 36/PUU-XV/2017.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau hukum normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori *fiqh siyāsah* yakni *siyāsah shar'īyyah*, *siyāsah dusturiyyah* dan *siyāsah duturiyyah qadaiyah wilāyah al-mazālim* untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan korupsi adalah menggunakan tafsir hukum yang digunakan yaitu tafsir hukum yang dilakukan oleh hakim, karena yang membuatnya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, teori tafsir hukum yang digunakan oleh hakim adalah teori tafsir hukum otentik, historis, dan ekstensif dalam membuat putusan tersebut untuk menenyukan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sejalan dengan hasil penelitian diatas maka Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam menyelesaikan masalah, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menggunakan satu teori penafsiran hukum saja, karena dalam teori penafsiran hukum sendiri terdapat banyak sekali macamnya yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Mahkamah Konstitusi dalam membuat sebuah putusan memiliki sifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat akhir dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus benar-benar memperhatikan segala aspek dalam menyelesaikan permasalahan, terutama dalam melakukan penafsiran hukum karena hal tersebut akan memberikan pengaruh kepada keseluruhan pihak yang bersangkutan.

PENDAHULUAN

Sebelum manusia mengenal Undang-Undang, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Hukum memiliki banyak sisi dan cakupan karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa.¹ Di dalam hukum terdapat sebuah istilah, yaitu penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah sebuah upaya untuk menjelaskan suatu hukum agar tidak disalah artikan.

¹Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2008, hlm. 12.

merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.²

Pengertian tafsir disini adalah mengungkap maksud dari ayat-ayat atau menangkap maksud perkataan tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang tersirat.³ Adapun pengertian dari tafsir hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Yang kedua harus dipahami adalah mengenai wewenang apa saja yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk dijalankan. Berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 24C ayat (1) ada lima kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu :⁴

1. Menguji undang-undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu umum.
5. Selain itu, mahkamah konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

Jadi kasus/perkara yang dapat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi adalah yang berkaitan dengan lima poin diatas. Bila ada yang mengajukan perkara yang tidak berkaitan dengan kasus diatas, maka Mahkamah

²www.wikipedia.com

³Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.kbbi.web.id

⁴Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H., *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta : Kencana), 2011, hlm. 111.

Namun akhir-akhir ini, di berbagai media yang ada baik itu media tulis, cetak, dan elektronik banyak yang menyayangkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian dari lembaga eksekutif, yang mana hal tersebut dinilai bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya meskipun tak menyatakan secara jelas menyatakan bahwa pada asalnya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen. Selain itu, dinilai bertentangan dengan UU KPK.

[illegible]

Semula putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyatakan suatu norma atau undang-undang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian berkembang dengan memberikan tafsir suatu norma atau undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat konstiusionalitas sehingga tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi membuat norma baru. Jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi maka suatu norma atau undang-undang tetap konstiusional sehingga dipertahankan legalitasnya.⁷

Selain itu, menurut Mahfud MD yang diwawancarai oleh media tribunnews.com memberikan pernyataan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang terbaru yaitu putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 mengabaikan penafsiran-penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam memberikan putusan terkait hal yang sama, yaitu mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁷Ibid, hlm. 212-222.

Fiqh siyāsah wadh’iyyah adalah siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya bukan bersumber pada hukum dan etika agama.⁹ Kedua *fiqh siyāsah* tersebut memiliki sumber dalam membuat hukum yang berbeda, adapun sumber dari *fiqh siyāsah shar’iyyah* adalah wahyu dan lingkungan manusia atau hukum

⁹Ibid, hlm. 106.

yang dihasilkan manusia itu sendiri.¹⁰ Sedangkan dalam *fiqh wadh'iiyyah* bersumber dari manusia itu sendiri tanpa melibatkan wahyu dari Allah SWT akan tetapi hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan agama, sesuai dengan hadits berikut :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمُ الْإِشْرَاطُ حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْحَلَ حَرَامًا

Artinya: “Kaum Muslim terikat ketentuan-ketentuan yang mereka tetapkan sendiri, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Al-Thabrani)¹¹

Jadi dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah analisis mengenai penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi yang digunakan untuk menentukan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam putusannya yang bernomor 36/PUU-XV/2017 dalam hukum yang berlaku di Indonesia, serta juga mampu menganalisis dari segi fiqh yang masuk kedalam *fiqh siyāsah*. Yang bertujuan untuk menambah wawasan serta lebih memahami bagaimana tafsir hukum dalam membuat putusan baik dari segi hukum di Indonesia dan hukum islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan terdapat beberapa ,masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul

¹⁰H. Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta : UI Press), 1995, hlm.

11.

¹¹Al-Thabrani, al-Mu'jam al-Kabir, Jilid XI, hlm. 405.

- ## E. Kajian Pustaka

Dari penelitian sebelumnya, penulis mengambil berbagai hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti kali ini, diantaranya :

- [illegible]

4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Theresia Ngutra, terdapat beberapa macam metode penafsiran yang dapat digunakan. Macam-macam cara penafsiran hukum ada dua macam, yaitu dalam pengertian subyektif dan objektif, dan dalam pengertian sempit dan luas. Berdasarkan sumbernya, penafsiran hukum bersifat otentik, doctrinal, dan hakim
5. Menurut Jimly Asshiddiqie di dalam Hukum Tata Negara terdapat Sembilan cara penafsiran hukum, yaitu teori penafsiran letterlijk atau harfiah, teori penafsiran gramatikal atau interpretasi, teori penafsiran historis, teori penafsiran sosiologis, teori penafsiran sosio-historis,

[illegible]

Dalam kelima kajian pustaka diatas terdapat tiga skripsi, satu jurnal, dan satu buku. Yang membedakan antara ketiga skripsi diatas dengan penelitian ini adalah ketiga skripsi tersebut membahas tentang Komosi Pemberantasan Korupsi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 sedangkan dalam penelitian ini terfokus terhadap penafsiran hukumnya dalam putusan yang sama.

Selain itu, satu jurnal dan satu buku tersebut berisi tentang macam-macam penafsiran hukum yang dapat digunakan untuk menemukan penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusannya yang bernomor 36/PUU-XV/2017.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang terdapat dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tafsir hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam putusannya yang bernomor 36/PUU-XV/2017.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada), 2009, hlm. 220-224.

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut :

1. Teoritis, yaitu memperkaya khazanah ilmu hukum untuk membangun argumentasi bagi peneliti lapangan mengenai tafsir hukum Mahkamah Konstitusi tentang posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017, maka inilah yang dijadikan objek penelitian.
2. Praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman oleh peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian lapangan terhadap kasus yang sama, serta dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menafsirkan hukum agar tidak salah dalam melakukan wewenangnya.

[illegible]

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu *fiqh* yang mempelajari tentang negara, yang mana terdapat beberapa cabang di dalamnya, yang salah satunya adalah *fiqh siyāsah dusturiyah*, yaitu tentang ketatanegaraan yang ada. Jadi dari judul diatas dianalisis dalam *fiqh siyāsah* agar menemukan bidang siyasah yang sesuai dalam membahas tentang penafsiran hukum oleh hakim dalam suatu perkara. Adapun cabang dari *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan penelitian ini adalah *fiqh siyāsah shar'iyah*, yang membahas penemuan sebuah hukum yang dilakukan berkaitan dengan hukum atau norma agama dan yang tidak berkaitan sama sekali. Untuk kelembagaan dalam negara yang berkaitan adalah *fiqh siyāsah dusturiyah* cabang *qada'iyyah wilāyah al-Mazālīm* yang mana hakim adalah bagian dari legislatif.

[illegible]

Jadi yang dimaksud dengan “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tafsir Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017” adalah mengamati secara rinci dari segi *fiqh siyāsah* terhadap tafsir hakim tentang posisi Komisi pemberantasan Korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017.

Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan metode penelitian secara normatif yang berjenis doktrinal research.

[illegible]

dan memberikan parameter tematik tentang apa yang diinginkan oleh hukum tersebut. Selain itu, juga menyangkut tinjauan kritis terhadap peraturan perundang-undangan dan proses putusan serta kebijakan yang mendasarinya.¹⁵ Dalam penelitian ini meneliti mengenai hukum normatif yang ada di Indonesia, yaitu mengenai tafsir hukum yang ada dalam putusan Mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan undang-undang.

1. Data yang dikumpulkan

Secara rinci data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diatas adalah :

- a. Data yang berkaitan dengan tafsir hukum oleh hakim dalam Analisis Terhadap Tafsir Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.
- b. Data yang berkaitan dengan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

2. Sumber data

¹⁵Dyan Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2013, hlm. 10.

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.¹⁶ Dalam penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut :

a. **Sumber Skunder**

Dalam sumber skunder terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum priemer adalah bahan hukum yang didapat langsung dari sumber utama melalui penelitian. Bahan hukum priemer dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).
- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

2) Bahan Hukum Skunder

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2006, hlm. 129.

Bahan hukum skunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum skunder, yaitu :

- a) Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada), 2009.
- b) Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta : Kencana), 2011.
- c) Moh. Mahfud MD, “Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi”, dalam Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta), 2009, Cetakan Pertama.
- d) Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, (Yogyakarta : PT. Rajagrafindo Persada), 2005.
- e) H. Ahmad Sukardja, H. Muzar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih, dan Kanun, (Jakarta : Sinar Grafika), 2012.
- f) al-Thabrani, al-Mu'jam al-Kabir, Jilid XI.
- g) H. Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk, (Jakarta : UI Press), 1995.
- h) Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta : Gaya Media Pratama), 2007.

3. Teknik Pengumpulan Data

4. Teknik Pengelolaan Data

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, dan kejelasan, makna, keselerasan dan kesesuaian antara bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tentang Analisis Fiqh Siyāsh Terhadap Tafsir Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh, yang kemudian dirumuskan kedalam analisis *Fiqh Siyāsh* Terhadap Tafsir Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 sehingga terlihat jelas hasilnya.

c. *Analyzing*, yaitu menganalisis data yang telah disusun dan disistematiskan kedalam analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tafsir Hakum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

5. Teknik Analisis Data

Data dan bahan hukum yang diperoleh dalam pengolahan, analisis, dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dengan lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data. Peneliti menganalisis penelitian ini dengan memberikan suatu penilaian terhadap analisis *Fiqh Siyāṣah* Terhadap Tafsir Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian ini lebih mengarah kepada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab I, merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan teori yang berisi tentang *Fiqh siyāsah* yang berhubungan dengan tafsir hukum yaitu *fiqh siyāsah dusuturiyah*, *syar’iyyah*, *wadh’iyyah*.

Bab III, merupakan data penelitian yang menyajikan tentang tafsir hukum Mahkamah Konstitusi tentang posisi Komisi Pemberang Korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 yaitu berupa prinsip penafsiran, metode penafsiran, dan sumber penafsiran

Bab IV, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan *Analisis Fiqh Siyāsah* Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberang Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yaitu baik dari segi *fiqh siyāsah* dan dari segi umumnya.

Bab V, merupakan penutup pada bab terakhir ini akan menyajikan simpulan dan saran.

hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.¹⁸

Adapun dari beberapa sumber yang berbeda, secara harfiah (leksikal), *fiqh* mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam lisan al-‘Arab. Menurut istilah, *fiqh* (fikih) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at, yang bersifat amaliah (praktis). Fikih juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-qur’an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad. Kata siyasah bersal dari akar kata سَاسَ - سِيَاسَة yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Di dalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab, kata *siyāsah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya *al-siyāsah* kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.¹⁹

Selain itu, *fiqh siyāsah* merupakan *tarkīb idhāfī* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (gerund) dari tashrifan kata *faqīha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi,

¹⁸ H. Imam Amrusi Jaclani, Nur Lailatul Musyafa'ah, M. Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara, 2013), 7

¹⁹ Drs, Aminuddin Aziz, MM, *Jurnal Kuliah Fiqh Siyahasah (Politik Islam)*, 1

fiqh lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁰

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ لَشَرْيْعَةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبِطَةِ مِنْ أَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلُهَا

Artinya: Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*)²¹

Dari beberapa sumber diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian dari *fiqh siyāsah*, yaitu suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan guna menjalankan kekuasaan kebangsaan atau kenegaraan untuk mencapai kemaslahatan bersama serta menjauhkan dari kemudharatan.

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Bidang pembahahasan dalam fiqh siyasah meliputi:²²

1. Fiqih Dusturi ialah mengenai ilmu kenegaraan dan bentuk serta sistem pemerintahan yang mencakup persoalan antara lain imamah dengan hak-hak dan kewajibannya.
2. Fiqih Maly ialah mengenai Baitul Mal, sumber-sumber perbendaharaan negara, persoalan perpajakan dan sebagainya.
3. Fiqih Dualy'am ialah mengenai hubungan antar negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional.

²⁰Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), 31

²¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 3

²²L. Amin Widodo, *Fiqih Siasah Dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), 1

1. *Siyāсах Qaḍāiyyah*

2. *Siyāṣah Dauliyyah*

3. *Siyāṣah Mālīyyah*

1. *Siyāsah Dustūriyyah Shar’iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan.

2. *Siyāsah Tasyrī'iyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum.

3. *Siyāsah Qadā'iyyah Shar'īyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan.

4. *Siayasah Māliyyah Shar'īyyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter.

5. *Siyāsah Idāriyyah Shar’iyyah* yaitu kebijakan administrasi Negara.

6. *Siyāsah Dauliyyah/Siyasah Khārijīyyah Syar’iyyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional.

7. *Siyāsah Tanfidziyyah Shar’iyyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang.

8. *Siyāsah Harbiyyah Shar’iyyah* yaitu politik peperangan.

1. Fiqh Dustury (kira-kira Dep. Perundang-undangan dan hukum).

2. Fiqh Maliy (Dep. Keuangan).

3. Fiqh Dauly (Dep. LuarNegeri).

4. Fiqh Harbiy (Departemen Petahanan dan Keamanan).

²⁷Drs, Aminuddin Aziz, MM, *Jurnal Kuliah Fiqh Siyasah*....., 4

Di dalam hukum terdapat sebuah istilah yaitu penafsiran hukum. Tafsir adalah menangkap maksud ayat-ayat atau menangkap maksud perkataan tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang tersirat.³¹ Adapun makna dari tafsir hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝ ٣٣

³² Departemen Agama, *Cordova Al-qur'an & Terjemah*, Surat ke 25 ayat 33

Dari penggalan ayat diatas, sudah mewakili pengertian dari tafsir itu sendiri, yaitu suatu penjelesan atau keterangan dan apabila dikaitkan dengan hukum maka maknanya akan menjadi keterangan atau penjelesan dari suatu hukum yang ada.

D. Teori *Fiqh Siyāsah* yang Berkaitan dengan Tafsir Hukum

Setelah memahami makna dari *fiqh siyāsah*, macam-macamnya, dan makna dari tafsir hukum maka yang selanjutnya adalah memahami teori *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan tafsir hukum. Adapun beberapa teori yang berkaitan adalah sebagai berikut :

1. Fiqh *Siyāsah Dustūriyah*

a. Pengertian *fiqh siyāsah dūsturiyah*

Kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi)

³³*Ibid.*

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut. Dengan demikian, *siyāsah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.³⁵

Persoalan di dalam *fiqh siyāsah duṣṭūriyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah

³⁵ Ibid, 22

b. Macam-macam *fiqh siyāsah dustūriyah*

Pertama, Konstitusi. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun

³⁷ H. Imam Amrusi Jaclani, Nur Lailatul Musyafa'ah, M. Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, 25

Kedua, Legislasi atau kekuasaan legislatif. Disebut juga al-sultah al-tashri'iyah adalah kekuasaan pemerintah islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah negara.

padu atas dasar iman/sabda Tuhan, b). penganut suatu agama, c). pengikut nabi, d). khalayak ramai, dan e). umum, seluruh manusia. Dalam jangkauannya makna ummah berbeda dengan nasionalisme. Nasionalisme sering diartikan ikatan yang kuat atas persamaan tanah air, wilayah, ras-suku, daerah dan hankam yang sempit yang kemudian menumbuhkan sikap nasionalisme (persamaan suku-bangsa) dan primordialisme (paling diutamakan).

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ هُمْ "وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ" فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ "فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani demos artinya rakyat, tein berarti pemerintah. Kemudian dimaknai kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Abraham Lincoln selanjutnya mengartikan demokrasi adalah bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

³⁸ Departemen Agama, *Cordova Al-qur'an & Terjemah*, Surat ke 3 ayat 159

1. *Sulṭah Tanfidhiyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang)
2. *Sulṭah Tashri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang)
3. *Sulṭah Qadā'iyah* (kekuasaan kehakiman)
4. *Sulṭah Mālīyah* (kekuasaan keuangan)
5. *Sulṭah Murāqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat)

[illegible]

يُدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ بِمَا نَسُوا يَوْمَ

الْحِسَابُ

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.³⁹

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qaḍā'*, *Wilāyah al-Maẓālīm*, dan *Wilayah al-Ḥisbah*. *Wilayah al-Qaḍā'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang.

³⁹ Departemen Agama, *Cordova Al-qur'an & Terjemah*, Surat 38 ayat 26

a. Pengertian *fiqh siyāsah shar’iyyah*

[illegible]

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمُ الْإِشْرَاطُ حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْأَحَلَّ حَرَامًا

Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah shar’iyyah* adalah sebuah hukum yang dapat dimunculkan meskipun di dalam nashnya tidak dijelaskan secara pasti atau tidak sama sekali, asalkan tidak bertentangan dengan syariat dan untuk kemaslahatan umat maka hukum tersebut boleh digunakan.

Dari segi tujuannya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil dari Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah (*siyāsah shar’iyyah*) tidak hanya bertujuan menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama bertujuan

⁴¹ Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Jilid XI, 405.

Jika dilihat dari sumber utamanya, maka *fiqh siyāsah* bersumber dari manusia dan lingkungannya. Peraturan yang bersumber dari lingkungan manusia sendiri meliputi pandangan para ahli, hukum, adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya yang memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia semata. Sementara itu, sumber utama dari *siyāsah shar’iyyah* adalah Al-qur’an, as-Sunnah, manusia dan lingkungannya. Karena *siyāsah shar’iyyah* mengajarkan pada semua manusia untuk mencapai kemaslahatan baik dunia maupun akhirat dengan berpegangan pada al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber vertikal serta manusia dan lingkungannya sebagai horizontal.⁴³

Jadi ada dua teori yang dapat dikaitkan dengan teori penafsiran hukum, yaitu fiqh siyasah duturiyah dan fiqh siyasah shar'iyah karena dalam fiqh siyasah dusturiyah cabang qada'iyyah mengatur tentang lembaga peradilan hal ini berkaitan dengan judul, yang mana dalam judul terfokus pada Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia. Selain itu alasan fiqh siyasah shar'iyah berkaitan juga karena di dalam teorinya menyebutkan bahwa hukum yang berasal dari orang yang memiliki kuasa untuk membuatnya diperbolehkan untuk digunakan

⁴³ Ibid, 191.

meskipun di dalam nash tidak dijelaskan atau bahkan tidak ada hukumnya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat.

E. Sejarah Peradilan dalam Islam

Peradilan pada masa rasulullah saw adalah rasul sebagai hakim yang pertama. Setelah rasulullah saw bangkit menyampaikan risalah, beliau pun bertindak sebagai hakim. Dengan demikian dapatlah kita menetapkan bahwa rasulullah saw adalah hakim pertama dalam Islam. Dalam Al-qur'an, Allah menerangkan bahwa undang-undang yang wajib dituruti oleh nabi dan diterapkan oleh islam. Rasulullah bertindak sebagai hakim, sebagai mubaligh yang menyampaikan syariat Tuhan. Para muslimin di masa rasul belum mempunyai hukum tertentu. Rasul tidak menunjuk seorang petugas menjadi hakim.⁴⁴

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضَ ذُنُوبِهِمْ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

لَفَاسِقُونَ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan

⁴⁴ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pusataka Rizki Putra, 1997), 7.

fasik.⁴⁵

berpekara.⁴⁶

memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, yaitu :⁴⁷

3. Sumpah, yaitu suatu pernyataan yang khidmat, diucapkan pada waktu member keterangan atau janji atas nama Allah SWT dengan menggunakan salah satu huruf qasam.

⁴⁵ Departemen Agama, *Cordova Al-qur'an & Terjemah*, Surat 5 ayat 49

⁴⁶ Ibid. 8.

⁴⁷Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A., *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 40.

⁴⁸ T. M. Hasbi Ash Shiddiegy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 8.

4. Penolakan, yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya.

Kemudian rasulullah saw juga mewanti-wanti tugas seorang hakim jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat membuat keputusan yang salah karena sedang tidak stabil atau emosi dan faktor lainnya seperti menerima suap dan lain-lain. Adapun hal-hal yang dilarang adalah larangan memutuskan perkara dalam keadaan marah, larangan suap dalam pemutusan hukum, menerima hadiah.⁴⁹

Sesudah dakwah islamiyah berkembang, rasulullah saw mengizinkan sebagian sahabat untuk bertindak selaku hakim, mengingat jauhnya tempat yang memerlukan putusan perkara dari kota Madinah. Kadang-kadang untuk latihan bagi para sahabat, beliau menyuruh sahabat itu memutuskan perkara di hadapan beliau sendiri. Hal ini merupakan petunjuk untuk mebolehkan memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.⁵⁰

Nabi Muhammad saw membenarkan para sahabat memberi fatwa. Apabila diperhatikan pada putusan-putusan hakim di masa para sahabat, demikian pula di masa nabi sendiri, maka terdapatlah bahwa sebagian hukum-hukum itu disanggah oleh yang berpekara dan diajukan lagi kepada

⁴⁹ Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A., *Sejarah Peradilan Islam*, 44.

⁵⁰ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 9.

Jadi dapat dikatakan bahwa pada masa Rasulullah sudah ada diskusi dengan para sahabat mengenai kedudukan suatu kasus atau hukum yang berkaitan dengan hal-hal tertentu, yang biasanya dikenal dengan istilah Ijtihad. Ijtihad di Indonesia sendiri sudah digunakan dalam sistem peradilan yang ada baik itu di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan bahkan juga menjadi landasan hakim untuk menafsirkan hukum.

[illegible]

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu huku. Penfasiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret.⁵⁴

Sebagai contoh pada peraturan perundang-undangan pada dasarnya menggeneralisasikan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Dalam pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa barang siapa secara melawan hukum sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling

⁵⁴ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 219.

Rumusan norma-norma adalah benda mati yang tidak bisa menjelaskan (berbicara) sendiri, sehingga perlu diberi makna oleh subjek pembacanya. Dalam hal ini diperlukan metode penafsiran hukum. Secara umum dikenal ada dua jenis metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Ada banyak metode interpretasi. Ada banyak metode interpretasi, yang sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode

[illegible]

Penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Seringkali tujuan kemasyarakatan ini dimaknai secara pragmatis. Contoh: kata-kata “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditafsirkan bahwa negara tidak lagi harus menepoli sendiri pengelolaannya (fungsi besturen/beheren). Pemerintah sebagai representasi negara, cukup mengatur dan mengawasi (fungsi regelen dan toezichthouden). Oleh sebab itu untuk sumber daya air yang notabene sumber hidup masyarakat banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha milik negara/daerah. Hak guna usaha air itu dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha air itu dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha (pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air).

Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Contoh: ketentuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam pasal 31 sampai 33 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[illegible]

6. Komparatif

7. Historistis

Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan. Contoh: istilah “menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup” dalam pasal 1 butir 25 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya ditafsirkan sebagai menteri lingkungan hidup.

Penfasiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Contoh: istilah “menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup” dalam pasal 1 butir 25 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ditafsirkan secara luas mencakup semua menteri yang bidang tugasnya bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, yaitu menteri negeri lingkungan hidup dan menteri-menteri teknis terkait pada kabinet tersebut.

Metode-metode penemuan hukum dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, pertama adalah the textualist approach dan yang kedua adalah the purposive approach. Interpretasi gramatikal dan otentik masuk ke dalam kategori pendekatan yang pertam, sementara metode yang lain mengacu kepada pendekatan kedua.⁵⁸

[illegible]

1. Teori penafsiran harfiah adalah penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis.
2. Teori penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan.
3. Teori penafsiran historis, mencakup dua pengertian, pertama adalah penafsiran sejarah perumusan undang-undang, dan yang kedua adalah penafsiran sejarah hukum.
4. Teori penafsiran sosiologis adalah konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acapkali memengaruhi legislator ketika naskah hukum itu dirumuskan.
5. Teori penafsiran sosio-historis adalah penafsiran yang difokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang memengaruhi rumusan naskah hukum.
6. Teori penafsiran filosofis adalah penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis.
7. Teori penafsiran teleologis adalah penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi.
8. Teori penafsiran holistik adalah penafsiran yang mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.
9. Teori penafsiran holistik tematis-sistematis.

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa berdasarkan sumbernya, metode penafsiran ada tiga, pertama adalah otentik, ialah penafsiran yang seperti diberikan oleh pembuat undang-undang, seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelas dan juga mengikat umum, yang kedua adalah dokrinair, ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan hasil-hasil karya para ahli, hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya memiliki nilai teoritis, dan yang terakhir adalah hakim, ialah penafsiran yang

[illegible]

bersumber pada hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu.⁶⁰

C. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya dalam Menafsirkan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar sebagai sumber utama, sebagaimana dijelaskan bahwa tidak boleh ada regulasi yang bertentangan dengannya. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 akan/dapat diuji konstutualitasnya oleh lembaga yudisial yaitu Mahkamah Konstitusi.⁶¹

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sekarang baru dikenal lembaga peradilan baru yang berada dalam kekuasaan kehakiman yang disebut Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dapat diketahui pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶²

Berdasarkan atas kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, maka kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dalam menangani perkara-perkara hukum yang terjadi dimasyarakat, maka disini Mahkamah

⁶⁰ KUHPerdata Pasal 1917 ayat 1.

⁶¹ Syawaluddin Hanafi, *Jurnal Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ekspos Vol. XXVI, Nomor 1, Januari-Juli 2017.1.

⁶² M. Yusrizal Adi Syaputra, *Jurnal Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*, Mercatoria Vol. 1 No. 2, 2008, 116.

Berbeda dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi memiliki wibawa yang sangat tinggi, bahkan dapat mengadili Mahkamah Agung, jika lembaga ini bersengketa dengan lembaga negara lain.⁶⁴ Berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 24C ayat (1) ada lima kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu umum. Selain itu, mahkamah konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.⁶⁵

Dari salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam Undang-Undang dasar 1945 tersebut, yang selalu menjadi fungsi penting yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif adalah fungsinya untuk menguji undang-undang terhadap undan-undang dasar.

⁶⁴ Ibid, 116.

⁶⁵Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H., *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), 111.

pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang multi-interpretatif terhadap konstitusi.⁶⁸

Dalam bukunya, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pentingnya Mahkamah Konstitusi adalah untuk memperkuat sistem check and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.⁶⁹

Dari beberapa pemaparan di atas dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang untuk menangani kasus yang berkaitan tentang konstiusionalisme undang-undang. Mahkamah Konstitusi juga merupakan sebuah lembaga yang bertugas sebagai penafsir konstitusi atau Undang-Undang Dasar terhadap peraturan di bawahnya, agar tidak terdapat sebuah kesalahan atau saling bertolak belakang antara peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang dasar itu sendiri, karena apabila tidak terdapat satu lembaga negarapun yang memiliki fungsi khusus untuk menafsirkan konstitusi akan terdapat beberapa kesalahan penafsiran terhadap suatu hukum dan juga adanya peraturan yang bertentangan dengan

⁶⁸ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 167

⁶⁹ J. J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 131

Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menangani permasalahan antar lembaga negara yang bersengketa.

Kenyataan bahwa perkembangan kegiatan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya menyebabkan tidak ada peraturan perundang-undangan yang sempurna, di dalamnya pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapny atau jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia. Aturan perundang-undangan bersifat statis dan rigid (kaku), sedangkan perkembangan kegiatan manusia baik fisik maupun non-fisik (pemikiran) selalu meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, suatu peristiwa kongkrit harus ditemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Menjelaskan, menafsirkan, dan melengkapi aturan hukumnya dilakukan agar hukum tidak berada diruang vakum yang tidak dapat digunakan bagi peristiwa kongkrit.⁷⁰ Disini Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menafsirkan bukan lagi sebuah undang-undang, melainkan menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam hubungannya dengan penafsiran hukum konstitusi, maka menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari suatu yang

⁷⁰ Syawaluddin Hanafi, *Jurnal Kewenangan Mahkamah Konstitusi*....., 6

Sebagai sebuah lembaga kekuasaan kehakiman dalam bidang peradilan tata negara, hakim konstitusi dalam menangani perkara-perkara yang dilimpahkan kepadanya, juga dalam melakukan proses beracara, memiliki suatu aturan hukum tentang proses beracara di pengadilan Mahkamah Konstitusi, begitu juga dengan putusan hakim terhadap perkara yang disidangkannya, hakim juga memutuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia. Akan tetapi tidak sedikit putusan dari hakim Mahkamah Konstitusi yang juga tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang berpekar atau pihak lain yang merasa bahwa dalam menjatuhkan putusannya, hakim Mahkamah Konstitusi tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kaidah hukum dan ketentuan yang berasal dari Undang-undang Dasar 1945 serta hukum yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu banyak terjadi pro dan kontra terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.⁷²

Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusannya yaitu final and binding, yang artinya apabila Mahkamah Konstitusi telah membuat suatu

⁷² M. Yusrizal Adi Syaputra, *Jurnal Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*, 117.

Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan, diberikan tiga hak, yaitu yang pertama adalah hak untuk meminta keterangan dari pemerintah mengenai kebijakannya yang penting dan strategis juga memiliki dampak yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua adalah hak angket, yaitu hak untuk melakukan suatu penyelidikan kepada pelaksanaan suatu undang-undang atau sebuah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan memiliki dampak yang luas kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah hak untuk menyatakan sebuah pendapat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat berhak memnyatakan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau mengenai sebuah kejadian luar biasa yang terjadi di Indonesia atau di luar Indonesia, mengenai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, dan yang terakhir adalah dugaan bahwa presiden dan/atau wakilnya diduga melakukan sebuah pelanggaran apapun bentuknya maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan haknya.⁷³

[illegible]

Bila melihat dari beberapa pemaparan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hak angket adalah hak istimewa Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap semua lembaga eksekutif yang dalam melaksanakan kewajiban atau wewenang yang dimilikinya bertentangan dengan undang-undang atau menurut undang-undang dianggap tidak perlu. Adapun hak angket hanya dapat berlaku pada lembaga eksekutif

[illegible]

karena hal tersebut mencakup pemerintahan, bukan memasuki ranah yudikatif atau legislatif.

E. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hukum di Indonesia

Di Indonesia sejarah pemberantasan korupsi telah dilaksanakan pada masa orde lama yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan dalam KUHP dan pembentukan lembaga/tim khusus untuk memberantas korupsi yang dilandasi pada Keppres Nomor 228 Tahun 1967. Namun pada saat itu, lembaga mengenai korupsi dianggap kurang berkontribusi karena tidak ada perumusan mengenai perbuatan yang merugikan negara.

Adapun pada masa orde baru, masalah tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang perumusannya tetap mengacu pada pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan dirumuskannya menggunakan delik formal. Sedangkan pada masa reformasi, undang-undang mengenai tindak pidana korupsi kembali diperlengkap dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, untuk memperkuat posisi pemberantasan korupsi yang pada saat itu di Indonesia dipegang oleh polri dan kejaksaan yang akhirnya dibentuk tim gabungan berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2000 yang dalam menjalankan fungsinya

⁷⁷ Baca pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi”.⁷⁸

ANALISIS TERHADAP TAFSIR HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 36/PUU-XV/2017

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikenakan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Perlu diketahui bahwa hak angket adalah hak istimewa Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap semua lembaga eksekutif yang dalam melaksanakan kewajiban atau wewenang yang dimilikinya bertentangan dengan undang-undang atau menurut undang-undang dianggap tidak perlu. Jadi dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari lembaga eksekutif.

Hal tersebut menjadi sangat ramai diperbincangkan selama tahun 2017 bahkan hingga sekarang masih dianggap merupakan sebuah permasalahan. Perlu juga diketahui bahwa ternyata pada saat membuat putusan tersebut, hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat atau penafsiran yang berbeda satu sama lain mengenai kedudukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdapat empat orang hakim dari total sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak setuju dengan putusan tersebut.⁸¹

63

Selain itu, menurut keempat orang hakim tersebut juga menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi

⁸³ Ibid, 118.

Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keempat orang hakim yang berbeda pendapat dengan putusan hakim tersebut menggunakan dua teori tafsir hukum yaitu historis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah tersebut.

ca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

[illegible]

Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam memutuskan perkara tersebut terdapat beberapa teori tafsir hukum yang digunakan oleh para hakim dalam membuat putusan tersebut, yaitu dari pihak yang setuju atau mayoritas sehingga putusan tersebut terbentuk adalah dengan menggunakan teori tafsir otentik, ekstensif, dan historis yang menghasilkan sebuah keputusan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari lembaga

⁸⁶ Ibid, 126.

eksekutif dan dapat dikenakan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun bagi hakim yang tidak setuju memiliki metode penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu menggunakan metode tafsir sistematis dan historis, sehingga menghasilkan putusan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah lembaga indepen yang tidak dapat dikenai hak angket dan hanya bertanggung jawab kepada presiden untuk segala tugas yang dilakukannya.

Penulis sendiri lebih condong kepada keempat hakim yang merasa keberatan dengan putusan tersebut, yaitu dengan menggunakan teori tafsir hukum sistematis dan historis, karena permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat tetapi juga berkaitan dengan Komisi Pemberantasan korupsi, sehingga tidak sepatutnya pengujian undang-undang tersebut hanya terfokus pada undang-undang tersebut saja melainkan harus dikaitkan juga dengan undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi agar putusan yang dihasilkan lebih obyektif. Selain itu bila dilihat dari sejarahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk karena pada suatu masa Negara Republik Indonesia mengalami tingkat kejahatan tindak pidana korupsi yang amat sangat besar sehingga dibentuk sebuah lembaga khusus yang bersifat independen khusus untuk memberantas korupsi, yang pertanggungjawabannya kepada presiden langsung. Dalam perkembangannya tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke dalam ranah eksekutif, melainkan tetap terfokus pada sebuah lembaga independen.

Selain itu juga dapat menggunakan tafsir otentik, untuk menafsirkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dijelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki banyak sekali wewenang sebagai sebuah lembaga negara karena korupsi merupakan sebuah tindak pidana luar biasa, dan bila dikaitkan dengan metode penafsiran ekstensi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi dapat dikatakan masuk ke dalam bagaian eksekutif tapi menjadi lembaga yang hampir mencakup semuanya.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat menggunakan teori penafsiran teleologis, adalah penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Jadi Mahkamah Konstitusi juga dapat berfokus pada dengan tujuan dan landasan Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pemaparan diatas, bahwa tafsir hukum yang digunakan adalah tafsir hukum yang dilakukan oleh hakim, karena yang membuat putusannya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, teori tafsir hukum yang digunakan oleh hakim adalah teori tafsir hukum otentik, historis, dan ekstensif dalam membuat putusan tersebut.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, teori fiqh siyasah yang berkaitan dengan penafsiran hukum ialah *fiqh siyāsah dustūriyah*. Dalam cakupan ruang lingkup *fiqh siyāsah dustūriyah* salah satunya adalah konstitusi. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepasakan karena memiliki karakter khas suatu negara. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur suatu masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut.

Apabila dikerucutkan kembali karena yang membuat putusannya adalah Mahkamah Konstitusi maka teori *fiqh siyāsah* yang digunakan adalah teori *fiqh siyāsah dutūriyah* yang berkaatan dengan lembaga yudikatif (*sulṭah qaḍā'īyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang di dalamnya berkaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah *Wilāyah al-Mazālim*, yaitu lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Karena dalam *Wilāyah al-Mazālim* didefinisikan sebagai lembaga negara peradilan yang menyelesaikan penyelewangan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat saja serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM.⁸⁷ Meskipun dalam putusan tersebut tidak mengatakan bahwa Undang-Undang MD3 tidak merugikan langsung kepada masyarakat, akan tetapi merugikan kepada salah satu lembaga negara yang wewenang menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang awalnya dianggap sebagai lembaga independen menjadi bagian dari lembaga eksekutif, maka Mahkamah Konstitusi boleh menangani kasus tersebut.

[illegible]

Bila dilihat dari pengertiannya, maka dengan Mahkamah Konstitusi menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bagian dari lembaga eksekutif agar dapat dikenai hak angket, maka hal tersebut boleh-boleh saja karena dikhawatirkan apabila tidak ada lembaga khusus untuk langsung mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan.

[illegible]

Kemudian rasulullah saw juga mewanti-wanti tugas seorang hakim jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat membuat keputusan yang salah karena sedang tidak stabil atau emosi dan faktor lainnya seperti menerima suap dan lain-lain. Adapun hal-hal yang dilarang adalah larangan memutuskan perkara dalam keadaan marah, larangan suap dalam pemutusan hukum, menerima hadiah.⁸⁸

Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi boleh melakukan penafsiran hukum dan mengurus perkara Undang-Undang MD3 yang berkaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan teori *fiqh siyasah dusturiyah* yang mencakup konstitusi dan berdasarkan *fiqh siyāsah dustūriyah qaḍā'īyyah Wilayah al-Maẓālim*. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi sah-sah saja apabila ditafsirkan menurut teori *fiqh siyāsah shar'īyyah*, karena dalam putusan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, menurut baginda Rasulullah saw boleh menafsirkan hukum yang belum ada dalam Al-qur'an dan as-Sunnah.

[illegible]

PENUTUP

1. Dari analisis hukum terhadap tafsir hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan korupsi adalah menggunakan tafsir hukum yang digunakan yaitu tafsir hukum yang dilakukan oleh hakim, karena yang membuat putusannya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, teori tafsir hukum yang digunakan oleh hakim adalah teori tafsir hukum otentik, historis, dan ekstensif dalam membuat putusan tersebut.
2. Berdasarkan analisis *fiqh siyāsah* Mahkamah Konstitusi boleh melakukan penafsiran hukum dan mengurus perkara Undang-Undang MD3 yang berkaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan teori *fiqh siyāsah dusturiyah* yang mencakup konstitusi dan berdasarkan *fiqh siyāsah duturiyah qaḍā'iyah Wilayah al-Mazālim*. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi sah-sah saja apabila ditafsirkan menurut teori *fiqh siyāsah shar'iyyah*, karena dalam putusan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, menurut baginda Rasulullah saw boleh menafsirkan hukum yang belum ada dalam Al-qur'an dan as-Sunnah, asalkan tidak bertentangan dengan pedoman syari'at Islam, karena pada masyara Rasulullah saw sendiri selain menggunakan Al-qur'an, beliau

juga membuat berbagai ketetapan agr dapat digunakan oleh hakim sebagai pedoman untuk menyelesaikan suatu perkara.

B. Saran

1. Dalam menyelesaikan masalah, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menggunakan satu teori penafsiran hukum saja, karena dalam teori penafsiran hukum sendiri terdapat banyak sekali macamnya yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Mahkamah Konstitusi dalam membuat sebuah putusan memiliki sifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat akhir dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus benar-benar memperhatikan segala aspek dalam menyelesaikan permasalahan, terutama dalam melakukan penafsiran hukum karena hal tersebut akan memberikan pengaruh kepada keseluruhan pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 2006.
- Aris, Ismail. *Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power*. 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2009.
- Aziz, Aminuddin. *Jurnal Kuliah Fiqh Siyahasah (Politik Islam)*.
- Burgh, Gr. Van der, J.D.C. Winkelma, *Penyelesaian Kasus*, terjemahan B. Arif Sidharta. Jurnal Pro Justitia. Tahun XII, No. 1. Januari 1994.
- Djazuli, A. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Hanafi, Syawaluddin. *Jurnal Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Ekspos Vol. XXVI, Nomor 1. Januari-Juli 2017.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2005.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Jaelani, H. Imam Amrusi, Nur Lailatul Musyafa'ah, M. Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara. 2013.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Mawar, Sitti. *Jurnal Metode Penemuan Hukum Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*.

- MD, Moh. Mahfud. “*Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi*”, dalam *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2009. Cetakan Pertama.
- Mufiana. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Objek hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rdalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pusataka Rizki Putra. 1997.
- Sukarja, H. Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta : UI Press. 1995.
- Sukardja, H. Ahmad, H. Mujar Ibnu Syarif. *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih, dan Kanun*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Susanti, Dyan Ochtorina, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Susanto, Antonio Freddy. *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2005.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta : Kencana. 2011.
- Syaputra, M. Yusrizal Adi. *Jurnal Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*. Mercatoria Vol. 1 No. 2. 2008.
- Syarif, Ibnu, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Tambunan, Arifin Sari Suruganlan. *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer. 1998.

- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- Widodo, L. Amin. *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 1994.
- Al-Thabrani. *al-Mu'jam al-Kabir*. Jilid XI.
- Yusni Nuraini, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari Perspektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)
- Departemen Kementrian Agama
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembaratan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)
- www.dpr.go.id
- www.wikipedia.com